

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Penyusunan kajian pustaka memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan dan kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk sua plagiat (Prastowo, 2012:81).

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:35), pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Menurut Muhammad Gade (2000:95), pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan.”.

Menurut Doddi Nordiawan (2006:5), pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan Serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan proses akuntansi untuk mengolah transaksi keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan .

2.1.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Nurlan Darise (2008:28) mengatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1) **Pertanggungjawaban**

Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.

2) **Manajerial**

Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

3) Pengawasan

Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas akuntansi pemerintahan memberikan penilaian atas pengelolaan keuangan oleh pemerintah dan pemerintah dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan atas sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik.

2.1.1.3 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah yang dikemukakan oleh Abdul Halim & Syam Kusufi (2014:44) adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan
Pencatatan adalah pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.
2. Pengidentifikasian (Penggolongan)
Pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.
3. Pelaporan
Pelaporan adalah transaksi ekonomi menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil proses akuntansi.

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:99), mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

- 1) Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan

2.1.2 *Good Government Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Government Governance*

Menurut Sadjijono (2007:203), pengertian *Good Government Governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Government Governance* mengandung arti: Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”.

Menurut LAN & BPKP (2001:6), pengertian *Good Government Governance* adalah sebagai berikut:

“Penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantaranya domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*Society*)”.

Menurut Sedarmayanti (2009:273), pengertian *Good Government Governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa *Good Government Governance* merupakan kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.

2.1.2.2 Indikator *Good Government Governance*

Adapun prinsip-prinsip *Good Government Governance* Menurut Tim Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (BPKP) dalam LAN (2000:152) Mengemukakan bahwa:

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Berikut Penjelasan dari pernyataan diatas:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah, dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Transparansi mewajibkan adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan dan pengelolaan pemerintahan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggungjawab publik bagi pengambilan keputusan di pemerintahan, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada para pemilik (stockholder).

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Responsibilitas berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Responsibilitas juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

4. *Independensi (Independency)*

Demi kelancaran pelaksanaan Good Government Governance, instansi harus dikelola secara independen dan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga masing-masing bagian instansi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)*

Kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, instansi harus senantiasa memperhatikan kepentingan organisasi berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Berdasarkan pernyataan di atas, penerapan pelaksanaan prinsip *Good Government Governance* secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dengan instansi pemerintahan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2011:143), Pengertian Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.”.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:21), pengertian Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya”.

Menurut Indra Bastian (2010:9), pengertian Harga Saham adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

2.1.3.2 Indikator Laporan Keuangan

Menurut Erlina Rasdianto (2013:8) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami

Adapun penjelasan indikator laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1) Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

a) Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas keempat indikator tersebut sangatlah diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran akan peta penelitian mengenai batas-batas yang akan diselidiki dan yang tidak akan tersentuh oleh proses penelitian. Kerangka pemikiran mengacu pada identifikasi masalah kemudian rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang ada (Miles dan Huberman, 2014:62).

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2008:72) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi,yaitu Prosedur akuntansi penerimaan kas,pengeluaran kas,selain kas, dan aset yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Mardiasmo (2004:35) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut: “Untuk dapat

menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal”..

Menurut Mahmudi (2011:27) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Hasil penelitian terdahulu Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan hasil penelitian Kadek Desiana Wati ., Nyoman Trisna Herawati, SE.AK,M.Pd. (2014) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Dari beberapa pernyataan diatas bahwa kualitas laporan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah.

2.2.2 Pengaruh *Good Government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Akadun (2007:146) menyatakan bahwa ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Government Governance* yaitu *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility*. Keempat komponen

tersebut penting karena penerapan *Good Government Governance* secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

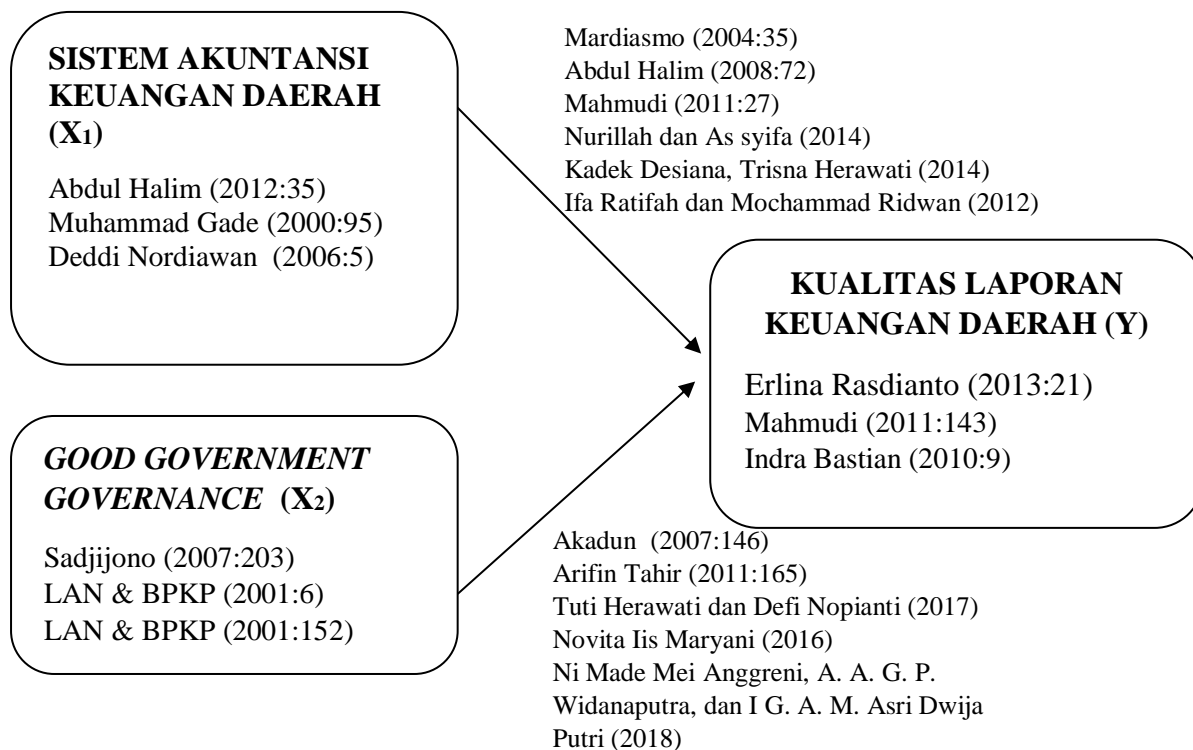
Menurut Arifin Tahir (2011:165) menyatakan bahwa Transaparansi adalah komponen penting dalam *Good Government Governance* terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara bebas dan mudah tentang proses pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian transparansi dapat dikatakan sebagai pendukung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Ni Made Mei Anggreni, A. A. G. P. Widanaputra, dan I G. A. M. Asri Dwija Putri (2018) menyatakan bahwa *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Sama halnya dengan penelitian Tuti Herawati dan Defi Nopianti (2017) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Novita Iis Maryani (2016) yang mengungkapkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan secara simultan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari beberapa pernyataan diatas bahwa *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.2.3 Paradigma Kerangka Pemikiran

Agar lebih mengetahui dan mengerti kerangka pemikiran pada penelitian yang telah dipaparkan, oleh sebab itu akan digambarkan pada paradigma penelitian melihat bagaimana hubungan antar variabel dipenelitian ini:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Keterangan :

X₁ = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X₂ = *Good Government Governance*

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa definisi hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Dan menurut Arikunto (2013:110) menyatakan bahwa definisi hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”.

Maka sesuai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian berarti sebagai hasil sementara yang masih harus dicari bukti fakta – faktanya, untuk mendapatkan hasil sementara dengan benar dan dari hipotesis peneliti yang telah dicatat dalam kerangka penelitian, inilah hipotesis penelitian yang telah dikaji sebagai berikut :

H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H2 : *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.